

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh serta pembahasan dari hasil penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016”, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah:

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya jika nilai pendapatan asli daerah meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah tersebut untuk mengalokasikan pengeluarannya yang dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama berbentuk infrastruktur.
2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum bersifat *Block Grant*, sehingga memungkinkan daerah

menggunakannya sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dikarenakan kebutuhan sulit diprediksi dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Namun pemerintah daerah yang menerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
4. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ketiga variabel yaitu PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan (DAU) untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan-kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerahnya.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau gambaran untuk mengevaluasi kinerja dan anggaran pemerintah daerah agar menjadi lebih baik. Sebaiknya pemerintah daerah menggunakan dana transfer yang berupa DAU dengan tidak membelanjakannya secara boros, akan tetapi dapat memanfaatkannya dengan baik dan bijaksana. Sehingga dana transfer tersebut dapat digunakan untuk menggali potensi daerah yang ada yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. Dengan pemanfaatan DAU diharapkan pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber Dana Alokasi Khusus dan pendapatan asli daerah yang berpotensi menaikkan persentase penerimaan PAD dan menurunkan alokasi dari pemerintah pusat.
2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:
 - Menghitung kembali potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing kab/kota, sehingga mampu menentukan target penerimaan pendapatan yang dapat dicapai.

- Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan di instansi-instansi yang mengelola sumber pendapatan daerah, guna menentukan langkah pengoptimalan target pendapatan asli daerah pada tahun berikutnya.
3. Adanya pemberian transfer dana pemerintah pusat, terkadang menyebabkan rendahnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan implikasi di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi pemerintah daerah, mengingat PAD memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja modal di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam sumber-sumber PAD harus lebih diintensifkan, terutama di sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandiriannya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik pula guna

memaksimalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada sektor publik.

2. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk pos belanja modal perlu diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang secara berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar kelak dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat dilakukan generalisasi secara tepat atas hasil penelitian tersebut. Penelitian berikutnya juga diharapkan mampu meneliti variabel lainnya yang mempengaruhi belanja modal, seperti dana bagi hasil, PDRB, SILPA, dan lain sebagainya. Selain itu dapat pula memasukkan variabel independen non keuangan seperti kebijakan pemerintah maupun luas wilayah. Dengan adanya variabel non keuangan dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.